Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
Volume 7, Nomor 2, September 2026
ISSN 2721 - 4311
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP



Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat di Kelurahan Gunung Baringin Kabupaten Mandailing Natal

Yulia Ramadani[1], Erni Asneli Asbi[2]*
[1,2)] Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
*E-mail: erni.asneli@usu.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang menghambat proses pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gunung Baringin, Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan program tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di wilayah tersebut telah berjalan cukup baik dengan mengacu pada empat indikator utama implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Program ini terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar program dapat berjalan lebih efektif, antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi petugas pelaksana, serta kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam aspek teknis dan kelembagaan agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal dan berdampak jangka panjang bagi penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan, Kesejahteraan

Abstract

Poverty is one of the main challenges that hinder the development process in developing countries, including Indonesia. To address this issue, the Indonesian government launched the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH), a conditional cash transfer program aimed at reducing poverty and improving the quality of life of poor families, particularly in the areas of education and health. This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program in Gunung Baringin Subdistrict, Mandailing Natal Regency. The research employed a qualitative method with a descriptive approach to provide an in-depth overview of the program's execution. Data collection techniques included in-depth interviews, direct field observation, and document analysis. The findings indicate that the implementation of PKH in the area has been relatively successful, based on four key policy implementation indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The program has made a positive contribution to improving the welfare of beneficiary communities. However, several challenges remain that need to be addressed to enhance program effectiveness, such as limited public awareness, inadequate capacity and competence of implementing officers, and suboptimal coordination between central and local governments. Therefore, continuous improvements in technical and institutional aspects are necessary to ensure the program achieves its objectives and provides long-term impacts on poverty alleviation.

Keywords: *Implementation, Family Hope Program (PKH), Poverty, Welfare*

Cara citasi : Ramadani, Yulia. Asbi, Erni Asneli. (2026) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat di Kelurahan Gunung Baringin Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 7 No 2 September 2026*, 174-184.
DOI: https://doi.org/10.30596/jisp.v7i2.24382

Naskah diterima : 03-05-2025 **Revisi akhir :** 23-9-2026 **Disetujui :** 29-10-2026

Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu hambatan utama dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Mayoritas penduduk miskin di Indonesia tersebar di wilayah pedesaan yang umumnya jauh dari akses terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di daerah tersebut kesulitan untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan modern dalam meningkatkan kualitas hidup mereka (Pratama, I. N., 2023).

Tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi hidup yang kurang layak berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas penduduk, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Dampaknya, kemiskinan cenderung berlangsung secara turun-temurun, di mana keluarga miskin melahirkan generasi baru yang juga hidup dalam kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dalam suatu keluarga sangat dipengaruhi oleh akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan (Etim & Thompson, 2021).

Sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah telah berupaya melalui berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Program-program bantuan sosial yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sebagai bagian integral dari proses pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rika Wati, 2020).

Salah satu program yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengatasi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan inisiatif unggulan pemerintah yang dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan sosial, yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera (Herlina, 2019). Melalui program ini, pemerintah menyalurkan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.

PKH telah diimplementasikan sejak tahun 2007 dengan fokus utama pada pemberantasan kemiskinan di kalangan keluarga yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Program ini ditujukan untuk membantu

kelompok masyarakat yang sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan mendasar di bidang pendidikan dan kesehatan, sekaligus meningkatkan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Secara umum, tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan antargenerasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong perubahan perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sebelumnya belum mendukung peningkatan kesejahteraan (Permensos No. 10 Tahun 2017).

Kelurahan Gunung Baringin yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, merupakan salah satu wilayah paling selatan di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kabupaten Mandailing Natal sendiri memiliki luas wilayah sekitar 653.542 hektare. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di wilayah ini memicu potensi naiknya angka kemiskinan serta menimbulkan berbagai persoalan kesejahteraan sosial lainnya. Di Kelurahan Gunung Baringin, pelaksanaan PKH menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas program di lapangan.

Implementasi PKH di daerah ini tidak terlepas dari berbagai hambatan yang muncul akibat proses pelaksanaan yang cukup rumit dan kompleks. Faktor-faktor tersebut menjadi penghalang dalam mencapai keberhasilan program. Selain itu, masih terdapat warga yang belum terjamin kesehatannya akibat keterbatasan biaya serta rendahnya tingkat pendapatan. Oleh karena itu, kehadiran PKH di Kelurahan Gunung Baringin diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai layanan yang tersedia.

Berbagai permasalahan yang muncul di Kelurahan Gunung Baringin sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi terkait PKH. Kurangnya kesadaran mengenai adanya pendampingan dari pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan juga menjadi faktor penghambat. Di samping itu, validitas data penerima manfaat seringkali dipertanyakan, karena masih ditemukan masyarakat yang secara ekonomi sudah membaik namun tetap menerima bantuan. Permasalahan lainnya meliputi ketidakpastian jadwal pencairan dana, keterlambatan dalam proses distribusi bantuan oleh petugas, serta kurangnya pembaruan data secara berkala oleh tim pelaksana PKH setempat. Minimnya kegiatan sosialisasi dari pihak pemerintah serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyimak informasi yang disampaikan turut memperburuk kondisi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan fokus penelitian yang diarahkan pada wilayah Kelurahan Gunung Baringin, Kabupaten Mandailing Natal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dipilih karena mampu menggambarkan secara rinci dan mendalam realitas sosial di lapangan, khususnya terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Gunung Baringin, Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek pelaksanaan PKH, termasuk tantangan, efektivitas, serta persepsi masyarakat dan pelaksana program. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, sehingga fokus kajian tertuju pada satu lokasi dan fenomena secara kontekstual dan mendalam. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh relevan dan berkualitas. Informan terdiri dari koordinator dan pendamping PKH yang memahami teknis pelaksanaan program, perangkat kelurahan seperti lurah dan staf yang mengetahui dukungan kebijakan lokal, penerima manfaat PKH yang mengalami langsung dampaknya, serta tokoh masyarakat yang memahami respon sosial terhadap program. Dengan kombinasi informan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi PKH serta mengungkap berbagai kendala dan potensi perbaikan yang dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat dalam bentuk tunai atau bantuan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. George C. Edward III (dalam Agustino), Implementasi menurut Edwards, diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (output, outcome), ia mengemukakan ada 4 (empat)

indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi (dalam Anwar dan Untari 2020). Berikut indikator Program Keluarga Harapan (PKH):

Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan, sebagaimana ditegaskan oleh Edward III yang dikutip (dalam penelitian Aminatul, Ratnasari, dan Lestariono) bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada kelancaran dan kejelasan komunikasi antara pihak pembuat kebijakan dengan para pelaksana di lapangan. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), komunikasi menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa tujuan program tersampaikan dengan baik, aturan dapat dipahami, dan bantuan tepat sasaran. Keberhasilan pelaksanaan PKH sangat ditentukan oleh bagaimana pendamping PKH memahami secara menyeluruh tugas dan tanggung jawab mereka, yang hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang terstruktur, jelas, dan konsisten.

Komponen pertama dalam komunikasi adalah transmisi, yaitu proses penyampaian informasi dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan kepada pelaksana di tingkat lokal. Di Kelurahan Gunung Baringin, transmisi dilakukan melalui rapat koordinasi dan kegiatan sosialisasi oleh pendamping PKH yang dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam setahun. Sosialisasi ini dilakukan di tempat yang mudah dijangkau masyarakat, seperti sekolah atau rumah warga, dan bertujuan menjelaskan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai cara memanfaatkan bantuan dengan baik serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Dalam kegiatan tersebut, pendamping tidak hanya memberikan informasi satu arah, tetapi juga membuka ruang dialog, memberikan kesempatan bertanya, berdiskusi, bahkan menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat. Informasi juga disampaikan kepada keluarga yang belum terdaftar namun memenuhi kriteria sebagai calon penerima, sehingga proses pemutakhiran data juga berjalan dengan transparan.

Komponen kedua adalah kejelasan, yaitu sejauh mana pesan-pesan dari pusat dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pendamping PKH dan penerima bantuan tanpa menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Di Kelurahan Gunung Baringin, ketua PKH secara rutin memberikan pengarahan kepada para pendamping mengenai teknis penyaluran dana bantuan, jadwal pencairan, serta tanggung jawab dalam melakukan pendataan dan pelaporan. Sosialisasi ini sangat membantu penerima manfaat dalam memahami isi dan tujuan program, serta menghindari salah tafsir mengenai penggunaan

dana. Pendamping juga menjaga transparansi dalam penyampaian informasi agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kesalahan persepsi dari masyarakat. Bahkan di luar jadwal sosialisasi resmi, pendamping tetap memberikan ruang konsultasi pribadi bagi penerima manfaat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Komponen ketiga adalah konsistensi, yaitu bagaimana komunikasi yang disampaikan tidak berubah-ubah dan tetap merujuk pada kebijakan yang berlaku. Konsistensi ini penting agar tidak terjadi kebingungan di tingkat pelaksana dan penerima manfaat. Dalam praktiknya, sosialisasi dan penyampaian informasi di Kelurahan Gunung Baringin dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh para pendamping. Mereka juga selalu mengikuti arahan dari ketua PKH setempat agar informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Konsistensi ini juga terlihat dari frekuensi sosialisasi yang stabil setiap tahun serta mekanisme pemantauan penggunaan dana bantuan oleh ketua PKH, guna memastikan dana digunakan sesuai keperluan seperti pendidikan dan kesehatan anak.

Namun demikian, pelaksanaan komunikasi dalam implementasi PKH tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penerima manfaat, yang menyebabkan mereka kesulitan memahami informasi yang disampaikan, terutama jika menggunakan istilah teknis. Kendala ini diatasi oleh pendamping PKH dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan pendekatan yang lebih personal saat menyampaikan informasi. Dengan metode ini, masyarakat menjadi lebih terbuka, aktif bertanya, dan lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta PKH.

Secara keseluruhan, komunikasi yang efektif dalam implementasi PKH di Kelurahan Gunung Baringin telah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan program, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Proses transmisi informasi yang tepat, kejelasan pesan yang disampaikan, serta konsistensi dalam pelaksanaan komunikasi menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Selain itu, pendekatan partisipatif dan komunikasi dua arah antara pendamping dan penerima manfaat telah menciptakan hubungan yang harmonis, serta memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Mengacu pada pandangan

Edward III yang dikutip oleh Umrah, Ratnasari, dan Lestariono, pelaksanaan suatu kebijakan akan sulit berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi manusia, informasi, wewenang, maupun fasilitas. Dalam konteks implementasi PKH di Kelurahan Gunung Baringin, penelitian ini menemukan bahwa komponen sumber daya manusia—seperti koordinator, pendamping, dan ketua PKH—telah menjalankan peran secara aktif meskipun dengan jumlah terbatas. Mereka bertugas melakukan pendataan, verifikasi, serta pendampingan, dengan dukungan informal dari perangkat lokal seperti kepala lingkungan.

Dari sisi informasi, pendamping PKH menjalankan sosialisasi rutin dan memberikan informasi tidak hanya kepada peserta aktif, tetapi juga kepada warga yang potensial menjadi penerima manfaat, sebagai bentuk transparansi dan inklusi sosial. Selanjutnya, aspek kewenangan menunjukkan bahwa pendamping memiliki otoritas formal untuk melaksanakan kegiatan operasional di lapangan, termasuk proses verifikasi dan distribusi bantuan. Namun, tantangan utama terletak pada aspek fasilitas. Sarana fisik untuk operasional program masih sangat terbatas, dengan tidak tersedianya ruang khusus, peralatan administrasi, maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Aktivitas sosialisasi dan koordinasi hanya mengandalkan fasilitas umum seperti madrasah atau rumah warga. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun implementasi PKH dari sisi SDM dan koordinasi cukup berjalan, masih terdapat kesenjangan signifikan pada dukungan sarana dan prasarana. Dengan demikian, peningkatan efektivitas PKH di Kelurahan Gunung Baringin membutuhkan perhatian khusus terhadap penguatan infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi dalam pendataan, serta pemberian dukungan operasional yang memadai bagi para pendamping. Optimalisasi keempat elemen sumber daya ini diharapkan dapat meningkatkan capaian program dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.

Disposisi

Disposisi, sebagaimana dijelaskan oleh Edward III dalam jurnal Umrah, Ratnasari, dan Lestariono (2023), merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup sikap, komitmen, serta motivasi dari pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), keberhasilan implementasi program tidak semata ditentukan oleh tersedianya sumber daya dan struktur birokrasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh dedikasi individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Pelaksana program, dalam hal ini pendamping PKH,

tidak hanya dituntut untuk memahami prosedur dan teknis program, tetapi juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk menyukseskan program demi tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Hasil penelitian di Kelurahan Gunung Baringin menunjukkan bahwa disposisi para pelaksana PKH, khususnya pendamping dan koordinator, secara umum berada dalam kategori positif. Sikap para pendamping dalam berinteraksi dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditunjukkan melalui pendekatan yang komunikatif, ramah, dan responsif terhadap keluhan serta kebutuhan peserta. Hal ini tercermin dalam proses sosialisasi program yang dilakukan secara persuasif dan penuh empati. Pendamping PKH diwilayah ini juga aktif memberikan arahan serta menjawab pertanyaan Masyarakat secara langsung, terutama dalam hal pemanfaatan bantuan, kepatuhan terhadap kewajiban sebagai penerima, dan prosedur administrasi. Kesiapan untuk merespons permasalahan yang muncul secara cepat menandakan bahwa pelaksana memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Komitmen Ketua PKH juga teridentifikasi melalui peran aktifnya dalam menyelesaikan kendala lapangan serta menjaga transparansi komunikasi antara pihak pelaksana dan penerima.

Lebih lanjut, disposisi juga tercermin dari tingkat kepatuhan pendamping terhadap aturan program serta inisiatif dalam membangun relasi sosial dengan masyarakat lokal. Keterlibatan aktif dalam memfasilitasi penyaluran bantuan dan kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa motivasi mereka tidak hanya berorientasi pada tugas administratif, tetapi juga pada tujuan jangka panjang program. Namun demikian, efektivitas disposisi pelaksana kebijakan juga perlu didukung oleh kepercayaan dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, keterbatasan komunikasi atau minimnya sosialisasi rutin dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai prosedur atau penggunaan dana bantuan. Oleh sebab itu, penting bagi pelaksana untuk secara konsisten meningkatkan kualitas komunikasi dan memperkuat kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat, misalnya dengan pelaksanaan pertemuan berkala sebelum pencairan bantuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai hak dan kewajiban KPM.

Selain pelaksana, disposisi pemerintah daerah juga menjadi faktor penting. Komitmen pemerintah dalam mendukung infrastruktur, menyediakan fasilitas teknis, dan mengawasi jalannya program akan menentukan konsistensi dan kesinambungan program PKH. Demikian pula, disposisi dari penerima manfaat harus diarahkan pada tanggung jawab moral untuk menggunakan bantuan secara produktif, sesuai dengan tujuan

program. Oleh karena itu, pendekatan pendampingan tidak boleh hanya bersifat transaksional, tetapi harus mencakup pembinaan sikap dan kesadaran sosial.

Secara keseluruhan, disposisi para aktor dalam implementasi PKH di Kelurahan Gunung Baringin menunjukkan kecenderungan yang positif. Akan tetapi, upaya peningkatan efektivitas tetap diperlukan, khususnya dalam membangun sistem komunikasi dua arah, memperluas jangkauan sosialisasi, serta mengembangkan kapasitas personal para pendamping melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan demikian, orientasi kebijakan tidak hanya berhenti pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga mengarah pada transformasi sosial yang nyata dalam kehidupan keluarga miskin yang menjadi sasaran program.

Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang mendasarinya. Meskipun tersedia sumber daya dan motivasi dari pelaksana, kelemahan dalam birokrasi dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program. Dalam konteks PKH, birokrasi tercermin melalui penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dijadikan acuan oleh pendamping PKH.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Gunung Baringin, SOP telah diterapkan dengan baik dan menjadi pedoman utama dalam menjalankan kegiatan PKH. Pelaksanaan program berjalan lancar sesuai arahan dari pusat, dengan koordinasi yang efektif antar tingkat pemerintahan mulai dari pusat hingga kelurahan. Struktur birokrasi yang tertata dengan baik, termasuk prosedur administrasi dan kepemimpinan yang kuat, mendukung keberhasilan program ini dalam menyalurkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Mengacu pada teori David C. Korten, pelaksanaan PKH mencakup tiga elemen utama: program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Ketiganya telah terlaksana cukup optimal. Tujuan program jelas, yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, dengan dukungan anggaran yang memadai. Organisasi pelaksana menunjukkan koordinasi yang baik dari tingkat pusat hingga kelurahan. Kelompok sasaran juga tepat sasaran, berdasarkan data yang terverifikasi dalam DTKS dan data lokal dari kelurahan. Namun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti perlunya penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan peningkatan efektivitas komunikasi antara pendamping dan

penerima manfaat agar program berdampak lebih signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Gunung Baringin, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Dalam hal komunikasi, meskipun ada interaksi yang efektif antara pendamping PKH, Ketua PKH, dan penyalur bantuan, terdapat masalah dalam sosialisasi kepada masyarakat. Banyak keluarga penerima manfaat yang kurang memperhatikan materi sosialisasi yang disampaikan, dan pembaruan data juga belum dilakukan secara teratur. Mengenai sumber daya manusia, pendamping PKH dan staf yang terlibat dalam pelaksanaan program sudah memenuhi kebutuhan, tetapi fasilitas pendukung, seperti gedung untuk penyaluran bantuan dan sosialisasi, masih sangat terbatas. Dari sisi disposisi, sikap pendamping PKH dan Ketua PKH terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat baik. Mereka cepat menanggapi keluhan dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan KPM, serta melakukan sosialisasi dengan sikap ramah dan sopan. Terakhir, terkait dengan struktur birokrasi, prosedur yang diterapkan oleh Kementerian Sosial, seperti SOP, telah diikuti dengan baik oleh pendamping PKH di Kelurahan Gunung Baringin, sehingga pelaksanaan program berjalan lancar sesuai harapan Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun demikian, agar Program Keluarga Harapan dapat lebih optimal dalam pengentasan kemiskinan, perlu adanya perbaikan dalam hal peningkatan fasilitas dan pembaruan data yang lebih teratur, serta sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat lebih memahami manfaat dan prosedur program ini. Secara keseluruhan, PKH telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi beberapa perbaikan pada aspek-aspek tersebut masih diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Abizal, N., Maimun, &Yulindawati. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 55-70.

Alamsyah, K., Prastiwi, NE., Salamah, U. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan daerah Kota Bekasi. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 12, Nomor 2

Anwar, F., & Untari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 2(1), 11–17. https://doi.org/10.31539/joppa.v2i1.1898

Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 3(1)

Darmiyanti, Reza., (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam PengentasanKemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020. Jurnal Dinamika Pemerintahan. Vol 1 No 1

Etim, N.-A. A., & Thompson, D. (2021). Religious Institutions and Poverty Reduction: Evidence from Akwa Ibom State, Nigeria. Journal La Sociale, 2(6), 31–38. https://doi.org/10.37899/journal-la sociale.v2i6.512

Hakim, L., Syahputra, DA. (2020). Al - Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 629-644

Herlina. (2019). Implementas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjunbalai (Tesis). Universitas Medan Area, Medan.

Ikmal., Rochaida, E. (2023). Analisis Implementasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Kartu Program Keluarga Harapan. INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen, 19(3), 632-639.

Kholif, K. I., Noor, I., & Siswidiyanto. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(4), 709–714.

Lingga Tawakal, S. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Salah Satu Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. FEB UB, 27(3), 259–280.

Mahmud, F., Mustari, N., & Haq, N. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN ENREKANG. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 17–33. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3396

Mei Alfianto, D. B., Istiyani, N., & Priyono, T. H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 6(1), 85.

Mustaghfiroh, S. I., & Ardi, M. N. (2022). Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 470-476.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, Z. (2019). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen), 1(2), 1–10.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press.

Pratama I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governancedi Kota Mataram. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan.

Rachma, M., Hidayat, Y., Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin.

PADARINGAN: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, 4(2), 93-104.

Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Manajemen Pembangunan, 5(1), 17-36.

Rika, W. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus: Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam).

Rusdarti, & Sebayang, L. K. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal Economia, 9, 1–9.

Sinurat, T.A.J. (2023). Implementasi Kebijaka Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara (Skripsi). Universitas Medan Area, Medan.

Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. At-Tibyan, 3(1), 1-16.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.

Virgoreta, D. A., Pratiwi, R. N., Suwondo. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2 (12), 1-6.

Wati, Rika. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Desa Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam). Skripsi Uin Ar Raniry